

RENCANA KERJA

TAHUN 2018

TAHUN 2018



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

*Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) BLOK A No.8
Pangkajene Sidenreng
Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan*

KATA PENGANTAR

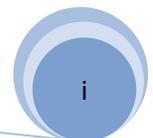
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat-Nya Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 dapat tersaji.

Terbitnya dan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 mempunyai arti strategis karena telah memasuki tahun ke-5 (lima) pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2014 – 2018.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2017 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2018 dan untuk mereview hasil



evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Adapun Waktu, tenaga, pikiran dan kerja keras telah dicurahkan untuk tersusunnya RENJA ini. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan laporan ini.

Pangkajene Sidenreng, Mei 2017
Kepala Dinas

PATAHANGI NURDIN, S. IP

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19691220 199009 1 002

DAFTAR ISI

Kata pengantar.....

Daftar isi

Daftar tabel.....

Bab I Pendahuluan.....

1.1. Latar Belakang.....

1.2. Landasan Hukum.....

1.3. Maksud dan Tujuan.....

1.4. Sistematika Penulisan.....

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 : Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2017.....
2. Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
3. Tabel 2.3 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018.....
4. Tabel 2.4 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
5. Tabel 3.1 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai dokumen resmi perencanaan daerah, mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Berdasar dari hal tersebut, maka tahapan perencanaan merupakan titik awal pembangunan suatu wilayah sehingga proses perencanaan harus dilakukan secara sistematis dan terarah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang memiliki dimensi waktu 20 tahun, kemudian dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memiliki dimensi waktu 5 tahun, dan selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan. RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014-2018 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan RENJA dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan dan tolak ukur capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, yang

kandungan pokoknya meliputi Visi, Misi, Kebijakan, Strategis dan Program serta Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Sifat RENJA ini adalah :

- a. Merupakan penjabaran operasional tahunan dari agenda yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa pada RENSTRA BPMPD tahun 2014-2018.
- b. Lebih memfokuskan pada respon kreatif terhadap kecenderungan perkembangan lingkungan strategis yang terkait dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- c. Penetapan sasaran dengan memperhatikan sasaran dalam RENSTRA Badan Pemberdayaan Masyarakat 2014–2018 dan dinamika dari isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan yang lebih menitikberatkan pada pembangunan yang bersifat botton-up (People centred Development) memberikan indikasi bahwa pemberdayaan masyarakat memegang peran yang sangat strategis dan memiliki keterkaitan dalam mendukung program.

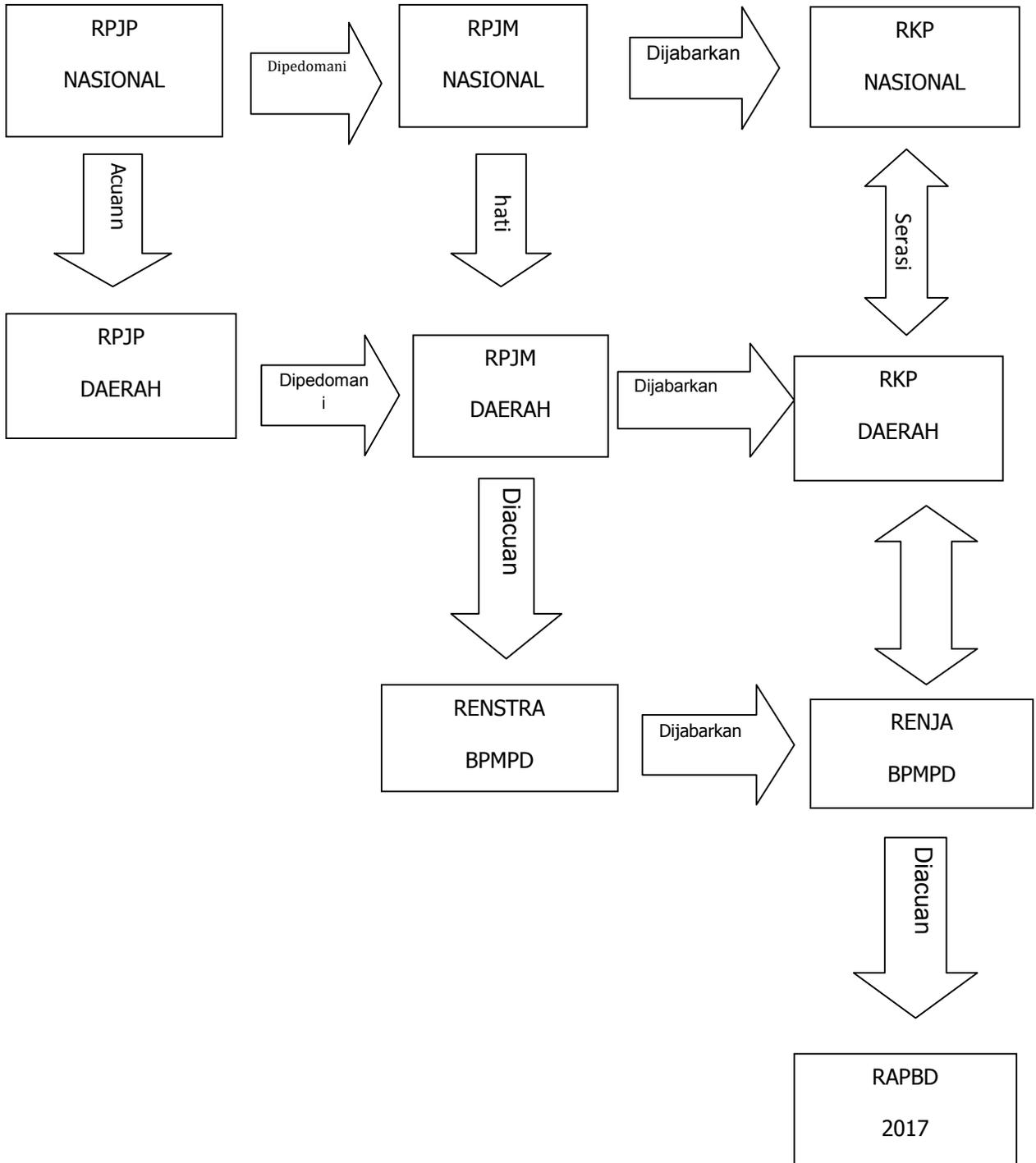
- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (enabling). Sebagai titik tolak pemahaman bahwa setiap manusia dalam masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi sumberdaya yang dimilikinya dan mengembangkannya secara produktif.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Upaya produktif ini dilakukan dengan pemberian input, berupa upaya penyadaran sosial, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, bantuan dana stimulan untuk mendukung proses produksi, pembangunan sarana dan prasarana pendukung, serta pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran hasil produksi

masyarakat, serta memberikan kemudahan akses dan berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

- c. Melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah (Propoor). Hal ini bertujuan untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang antara kelompok masyarakat yang tidak berdaya dengan yang kuat, diantaranya melalui berbagai program yang bersifat pemberian (Charity). Namun dengan demikian, Pembangunan Daerah (RKPD) serta Rencana Staregis (RENSTRA) dapat di gambarkan sebagaimana gambar dibawah ini sebagai berikut :

Adapun keterkaitan antara Rencana Kerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis (RENSTRA) dapat digambarkan sebagaimana gambar dibawah ini sebagai berikut :

DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH



1.2. Landasan Hukum

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang merupakan penjabaran dari PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Penyusunan suatu kegiatan harus dilandasi oleh kekuatan Hukum agar kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai validitas yang kuat. Adapun Landasan Hukum dalam Penyusunan Renja adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2007;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan dan Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (RPJMD) 2014 – 2018.
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 41);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Kerja (RENJA) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Renja ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Draft Awal Rencana Kerja sebagai bagian integral dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Penyusunan Rencana Kerja yang efektif dan efisien.

Esensi dari sistem RENJA bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang adalah perwujudan dari implementasi sistem Penyusunan Rencana Kerja Anggaran. Penyusunan Renja Tahun Anggaran 2017 ini tidak lepas dari Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 yang diperoleh.

Penyusunan Renja ini memiliki dua Tujuan utama yaitu :

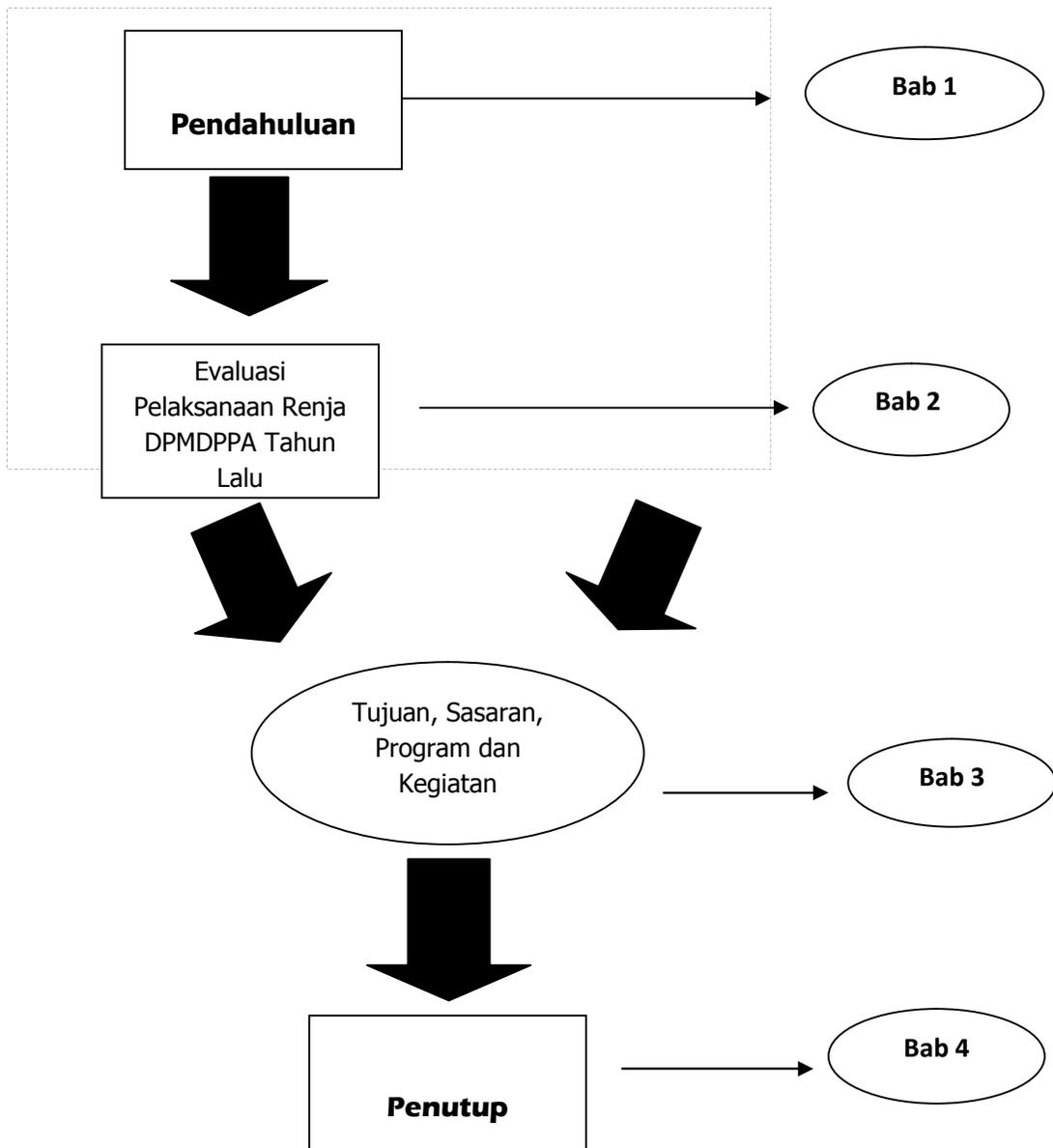
Pertama, Rencana Kerja (RENJA) merupakan sarana bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kabupaten Sidenreng Rappang untuk membuat suatu Program/Kegiatan yang berbasis pada Kepentingan Masyarakat.

Kedua, Rencana Kerja (RENJA) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Tahun sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dua Tujuan utama RENJA tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) oleh setiap instansi pemerintah.

1.4. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang tahun sebelumnya sebagai tolak ukur Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana Kerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (**Performance Gap**) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.



Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab. I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPMPD
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan BPMPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPMPD
- 2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPMPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab. IV. PENUTUP

Lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SAMPAI TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sampai Tahun Berjalan.

Rencana Kerja merupakan program kerja kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi bagian dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2016 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2017 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran yang mencakup kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan Jasa Milik daerah, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan kantor, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dan Pelayanan Administrasi Perkantoran telah mencapai tingkat realisasi target Renja 28% dan Capaian target Renstra (periode 2014-2018) sampai Tahun 2017 Triwulan II telah mencapai 57%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mencakup kegiatan pembangunan gedung kantor, Pengadaan Mobil Jabatan, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan moubiler, pemeliharaan rutin berkala gedung kantor, kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin berkala gedung kantor, dan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor telah mencapai tingkat realisasi target Renja 0% dan Capaian target Renstra (periode 2014-2018) sampai Tahun 2017 Triwulan II hanya mencapai 21%

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mencakup kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja DPMDPPA telah mencapai tingkat realisasi target Renja 67% dan capaian target Renstra (periode 2014-2018) sampai Tahun 2017 Triwulan II hanya mencapai 73%
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan yang mencakup kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan, Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat, Pelaksanaan gelar teknologi tepat guna, Tersedianya pos pelayanan TTG di kecamatan, Pembinaan dan fasilitas pokja dan PKK desa dan kelurahan, Pembinaan dan fasilitas kelembagaan POKMAS pengelolaan air bersih, Pembinaan dan fasilitas kelembagaan kader/Pokja AMPL, Pembinaan dan fasilitas kelompok UMKM, Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan (pemetaan komunikasi), Pelatihan keterampilan bagi masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam menjadi barang produksi, Pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna telah mencapai tingkat realisasi target Renja 25% dan capaian target Renstra (periode 2014-2018) sampai Tahun 2017 Triwulan II hanya mencapai 30%
5. Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa yang mencakup kegiatan Pemberian stimulant pembangunan desa, Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (lomba desa), Penguatan kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan, Pemberian stimulant pembangunan desa, Monitoring, evaluasi, dan pelaporan, PNPM, Pelatihan bagi pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat (LKMD/LPM), Pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM), Rapat koordinasi kelembagaan masyarakat desa kelurahan, Sosialisasi pedoman pengelolaan ADD, Penyusunan draf rancangan perda tentang desa, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa (pemilihan dan pelantikan kepala desa) telah mencapai tingkat realisasi target Renja 30% dan capaian target Renstra (periode 2014-2018) sampai Tahun 2017 Triwulan II hanya mencapai 65%
6. Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan yang mencakup kegiatan Pelatihan dan fasilitas BUMDES, Pelatihan bagi pengelolaan BUMDES, Pelatihan keterampilan Manajemen badan usaha milik desa telah mencapai tingkat realisasi

target Renja 0% dan capaian target Renstra (periode 2014-2018) sampai Tahun 2017 Triwulan II hanya mencapai 0%

7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang mencakup kegiatan Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, BinteK pengisian buku administrasi desa, Pembinaan dan evaluasi pengisian data profil desa/kelurahan, BinteK penyusunan perdes, Sosialisasi peraturan perundang undangan tentang desa, Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa, BinteK APBDesa, Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam bidang perencanaan partisipasi, Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang investasi kekayaan dan asset desa, Pelantikan aparatur pemerintah desa dalam bidang penataan kawasan pedesaan telah mencapai tingkat realisasi target Renja 0% dan capaian target Renstra (periode 2014-2018) sampai Tahun 2017 Triwulan II hanya mencapai 100%
8. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak yang mencakup kegiatan Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A), Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan perempuan pemberdayaan perempuan dan anak, Evaluasi pelaksanaan PUG telah mencapai tingkat realisasi target Renja 81% dan capaian target Renstra (periode 2014-2018) sampai Tahun 2017 Triwulan II hanya mencapai 66%
9. Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan yang mencakup kegiatan Pelaksanan kebijakan perlindungan perempuan di daerah telah mencapai tingkat realisasi target Renja 0% dan capaian target Renstra (periode 2014-2018) sampai Tahun 2017 Triwulan II hanya mencapai 43%
10. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan yang mencakup kegiatan Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender, penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahterah, Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha, pembinaan organisasi perempuan telah mencapai tingkat realisasi target Renja 0% dan capaian target Renstra (periode 2014-2018) sampai Tahun 2017 Triwulan II hanya mencapai 50%

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun 2017 sampai dengan Triwulan II dan pencapaian Renstra s/d tahun 2017 Triwulan II dapat dilihat pada Tabel I.A berikut :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Sidenreng Rappang. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA) Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Bina Pemerintahan Desa
 - a. Seksi Penataan Desa dan Kelembagaan Pemerintahan Desa
 - b. Seksi Keuangan dan Aset Desa
 - c. Seksi Pengembangan Kerjasama Desa
4. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
 - a. Seksi Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial
 - b. Seksi Kelembagaan, Adat dan Budaya Masyarakat
 - c. Seksi Ketahanan Masyarakat
5. Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
 - b. Seksi Pendaya Gunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

c. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pedesaan

Beberapa hal yang menjadi kinerja SKPD dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :

- a. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan ekonomi masyarakat serta melaksanakan bimbingan teknologi tepat guna dalam proses pemanfaatan potensi sumber daya alam di desa.
- b. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan perana kelembagaan dan pelatihan masyarakat.
- c. Mengolah data, pengolahan keuangan desa, menyusun, merencanakan dan melaksanakan pengembangan pemerintahan desa.
- d. Mengumpulkan, mengelola data, merencanakan, melaksanakan dan memberi petunjuk serta bimbingan terhadap peningkatan fungsi dan peran kelembagaan masyarakat dan lembaga lainnya.
- e. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, pembinaan nilai-nilai sejarah kebangsaan dan pelaksanaan pembauran.
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik, kelembagaan politik dan pemantapan kewapadaan dini dan kerjasama intelejen keamanan.
- g. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi hubungan dengan organisasi masyarakat.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan DPMDPPA tahun 2014 s/d tahun 2018 dapat kita lihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

**Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMDPPA
Kabupaten Sidenreng Rappang**

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Lembar : ke 1 dari 2

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra DPMDPPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1.	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	100%	100%	100%	100%	100%	96%	38%	100%	100%	
2.	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang efektif berfungsi	-	100%	100%	100%	100%	100%	96%	28%	100%	100%	
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66%	100%	100%	
4.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	-	100%	10%	10%	10%	10%	100%	2%	10%	10%	-

Lembar : ke 2 dari 2

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
5.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa (Jumlah Bumdes yang dibina dan di Fasilitas)	-	86%	15%	19%	86%	86%	96%	22%	17%	19%	-
6.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	100%	100%	100%	100%	100%	88%	83%	100%	100%	-
7.	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	-	21%	17%	19%	21%	21%	99%	0%	17%	19%	-

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Untuk mengidentifikasi Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD maka dapat kita lihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel : 2.3 . Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian	Capaian Saat ini	Standar yang di gunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BPMPD
			Internal	Eksternal	
Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya oleh LPM/LKM D	33%	33%	-	-	Rendahnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkatkan kapasitasnya	100%	100%	-	-	Rendahnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Persentase desa yang berstatus swakarsa	0%	0%	-	-	Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
Jumlah Bumdes yang dibangun dan difasilitasi	14%	14%	-	-	Rendahnya intensitas pembinaan dan fasilitasi Bumdes

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka beberapa permasalahan pelayanan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa yang masih memerlukan perhatian untuk diselesaikan seperti : masih tingginya angka kemiskinan, belum memadainya kualitas SDM aparatur pemerintah desa, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta rendahnya kualitas lembaga kemasyarakatan di desa.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang yang diselaraskan dengan Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Lembar 1 dari 10

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	100%	600.000.000	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	100%	600.000.000	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Batu Lappa	Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat	100%	2.250.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMDPPA	Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat	100%	2.250.000	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batu Lappa	Tersedianya Jasa Kebutuhan Pemakaian Listrik, Telpon & Air	100%	70.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMDPPA	Tersedianya Jasa Kebutuhan Pemakaian Listrik, Telpon & Air	100%	70.000.000	
3.	Penyediaan Jasa Jaminan milik Daerah	Batu Lappa	Tersedianya Jaminan Barang Milik Daerah	100%	5.016.000	Penyediaan Jasa Jaminan milik Daerah	DPMDPPA	Tersedianya Jaminan Barang Milik Daerah	100%	5.016.000	
4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Batu Lappa	Tersedianya Jasa Kebutuhan Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas	100%	2.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DPMDPPA	Tersedianya Jasa Kebutuhan Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas	100%	2.000.000	
5.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Batu Lappa	Tersedianya Administrasi Keuangan	100%	100.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DPMDPPA	Tersedianya Administrasi Keuangan	100%	100.000.000	

Lembar ke 2 dari 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Batu Lappa	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor	100%	13.196.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPMDPPA	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor	100%	13.196.000	
7.	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi luar Daerah	Batu Lappa	Tersedianya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	100%	150.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi luar Daerah	DPMDPPA	Tersedianya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	100%	150.000.000	
8.	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi dalam daerah	Batu Lappa	Tersedianya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	100%	10.000.000	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi dalam daerah	DPMDPPA	Tersedianya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	100%	10.000.000	
9.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Batu Lappa	Tersedianya Kebutuhan akan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	247.538.000	Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPMDPPA	Tersedianya Kebutuhan akan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	247.538.000	
II.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang efektif berfungsi	100%	4.268.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang	100%	4.668.000.000	

								efektif berfungsi			
1.	Pembangunan Gedung Kantor	DPMDPPA/Kantor Desa	Tersedianya Sarana & Prasarana Aparatur	Pembangunan Rehab kantor Desa/BPD/ Posyandu sebanyak 30 Paket (Hasil Musrembang/ Hasil Reses Anggota DPRD Tahun 2016	3.260.000.000	Pembangunan Gedung Kantor	DPMDPPA	Tersedian ya Sarana & Prasarana Aparatur	13 Paket Hasil Reses dan 40 Paket Hasil Musrenbang Pemb/Rehab gedung Kantor Desa/BPD, Kelurahan & Posyandu Musrenbang Th.2016	3.260.000.000	
2.	Pengadaan Kendaraan Mobil Jabatan	Batu Lappa	Tersedianya Sarana & Prasarana Aparatur	-	0	Pengadaan Kendaraan Mobil Jabatan	DPMDPPA	Tersedian ya Sarana & Prasarana Aparatur	-	0	
3.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Batu Lappa	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	34.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DPMDPPA	Tersedian ya Perle ngka pan Gedung Kantor	100%	34.000.000	
4.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Batu Lappa	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100%	34.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	DPMDPPA	Tersedian ya Per alatan Gedung Kantor	100%	34.000.000	
5.	Pengadaan Mubeleur	Batu Lappa	Tersedianya Kebutuhan Mebeleur	100%	45.000.000	Pengadaan Mubeleur	DPMDPPA	Tersedian ya Ke butu han Mebeleur	100%	45.000.000	
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Batu Lappa	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	100%	50.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	DPMDPPA	Tersedian ya Pe melihar	100%	50.000.000	

			Kantor			Kantor		aan Rutin/Berkala Gedung Kantor			
7.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Batu Lappa	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	45.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPMDPPA	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	45.000.000	
8.	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Batu Lappa	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100%	6.000.000	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	DPMDPPA	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100%	6.000.000	
9.	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Batu Lappa	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100%	6.000.000	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	DPMDPPA	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100%	6.000.000	
III.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan		Persentase capaian kinerja dan keuangan	100%	18.500.000	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &	DPMDPPA	Persentase capaian kinerja dan keuangan	100%	18.500.000	

						Keuangan		n			
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi Kinerja DPMDPPA	Batu Lappa	Tersedianya Lakip, Renstra, & RKA/DPA	100%	18.500.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi Kinerja DPMDPPA	DPMDPPA	Tersedianya Lakip, Renstra, & RKA/DPA	100%	18.500.000	
IV.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Persentase desa yang berstatus swakarsa	10%	2.300.000.000	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Persentase desa yang berstatus swakarsa	10%	2.300.000.000	
1.	Pembinaan Dan Fasilitas Pokjar dan PKK Desa/Kelurahan	Desa/Kel	Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitas Pokjar dan PKK di Desa/ Kelurahan	100%	500.000.000	Pembinaan Dan Fasilitas Pokjar dan PKK Desa/Kelurahan	Desa/Kel	Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitas Pokjar dan PKK di Desa/ Kelurahan	100%	500.000.000	
2.	Pendayagunaan dan Pemanfaatan TTG	Desa/Kel	Terwujudnya Pendayagunaan dan Pemanfaatan TTG	100%	50.000.000	Pendayagunaan dan Pemanfaatan TTG	Desa/Kel	Terwujudnya Pendayagunaan dan Pemanfaatan TTG	100%	50.000.000	
3.	Pelaksanaan gelar TTG	Provinsi	Terselenggaranya Pelaksanaan Gelar TTG	100%	30.000.000	Pelaksanaan gelar TTG	Desa/Kel	Terselenggaranya Pelaksanaan Gelar TTG	100%	30.000.000	

4.	Pembinaan dan Fasilitas Pos pelayanan TTG di Kecamatan	Kecamatan	Tersedianya Pos Pelayanan TTG di Kecamatan	100%	50.000.000	Pembinaan dan Fasilitas Pos pelayanan TTG di Kecamatan	Kecamatan	Tersedianya Pos Pelayanan TTG di Kecamatan	100%	50.000.000	
5.	Pembinaan dan Fasilitas Kelembagaan Kader/Pokja AMPL	Desa/Kel	Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitas Kelembagaan Kader/Pokja AMPL	100%	60.000.000	Pembinaan dan Fasilitas Kelembagaan Kader/Pokja AMPL	Desa/Kel	Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitas Kelembagaan Kader/Pokja AMPL	100%	60.000.000	
6.	Pembinaan dan Fasilitas Kelompok UMKM	Desa/Kel	Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitas Kelompok UMKM	100%	800.000.000	Pembinaan dan Fasilitas Kelompok UMKM	Desa/Kel	Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitas Kelompok UMKM	100%	800.000.000	
7.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (Pemetaan Komunitas)	Desa	Tersedianya Data dan Informasi hasil Pemetaan Komunitas	100%	130.000.000	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (Pemetaan Komunitas)	Desa	Tersedianya Data dan Informasi hasil Pemetaan Komunitas	100%	130.000.000	
8.	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat (KPM D/K)	Desa/Kel	Tersedianya Pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan Masyarakat (KPM D/K)	100%	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat (KPM D/K)	106 Desa/Kel	Tersedianya Pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan Masyarakat (KPM D/K)	100%	150.000.000	

9.	Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan pokmas pengelolaan air bersih	Desa/ Kelurahan	Penguatan Kelembagaan Pokmas Pengelolaan Air Bersih	100%	30.000.000	Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan pokmas pengelolaan air bersih	Desa/Kel	Penguatan Kelembagaan Pokmas Pengelolaan Air Bersih	100%	30.000.000	
10.	Pelatihan Keterampilan bagi masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Alam menjadi barang produksi	Desa/ Kelurahan	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Mengelola Sumber Daya Alam menjadi barang produksi	100%	500.000.000	Pelatihan Keterampilan bagi masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Alam menjadi barang produksi	Desa/Kel	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Mengelola Sumber Daya Alam menjadi barang produksi	100%	500.000.000	
V.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya oleh LPM/LKMD	17%	1.399.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	DPMDPPA	Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya oleh LPM/LKMD	17%	1.399.000.000	

1.	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Lomba Desa)	Desa/ Kelurahan	Terselenggaranya Pembinaan Desa/Kelurahan yang akan mengikuti Lomba Desa/Kelurahan tingkat Propinsi/Pusat (Lomba Desa) Kelurahan Tingkat Provinsi/Pusat.	100%	180.000.000	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Lomba Desa)	DPMDPPA	Terselenggaranya Pembinaan Desa/Kelurahan yang akan mengikuti Lomba Desa/Kelurahan tingkat Propinsi/Pusat (Lomba Desa) Kelurahan Tingkat Provinsi/Pusat.	100%	180.000.000	
2.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa (Pemilihan dan Pelantikan kepala Desa)	Desa	Tersedianya kepala Desa Definitif	100%	350.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa (Pemilihan dan Pelantikan kepala Desa)	Desa	Tersedianya kepala Desa Definitif	100%	350.000.000	
3.	Penguatan kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan	Desa kelurahan	Terwujudnya penguatan kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	80.000.000	Penguatan kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan	Desa kelurahan	Terwujudnya penguatan kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	80.000.000	
4.	Sosialisasi Pedoman Pengelolaan ADD bagi Aparatur Pemerintah Desa (Sosialisasi ADD)	Desa	Terselenggaranya Sosialisasi Pedoman Pengelolaan ADD bagi Aparatur Pemerintah Desa (Sosialisasi ADD)	100%	61.000.000	Sosialisasi Pedoman Pengelolaan ADD bagi Aparatur Pemerintah	Desa	Terselenggaranya Sosialisasi Pedoman Pengelolaan ADD	100%	61.000.000	

						<i>Desa (Sosialisasi ADD)</i>		<i>bagi Aparatur Pemerintah Desa</i>			
5.	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD (Alokasi Dana Desa) dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DD (Dana Desa)</i>	<i>11 Kecamatan</i>	<i>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD dan DD (Dana Desa)</i>	<i>100%</i>	<i>73.000.000</i>	<i>Monitoring Evaluasi dan Pelaporan ADD dan DD</i>	<i>11 Kecamatan</i>	<i>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD dan DD</i>	<i>100%</i>	<i>73.000.000</i>	
6.	<i>PNPM</i>	<i>Kecamatan</i>	<i>Terlaksananya Pembinaan Proyek (PNPM)</i>		<i>370.000.000</i>	<i>PNPM</i>	<i>10 Kecamatan</i>	<i>Terlaksananya Pembinaan Proyek (PNPM)</i>	<i>10 Kecamatan</i>	<i>370.000.000</i>	
7.	<i>Pelatihan bagi Pengurus LKMD/LPM</i>	<i>11 Kecamatan</i>	<i>Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LKMD/LPM)</i>	<i>100%</i>	<i>85.000.000</i>	<i>Pelatihan bagi Pengurus LKMD/LPM</i>	<i>11 Kecamatan</i>	<i>Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LKMD/LPM)</i>	<i>100%</i>	<i>85.000.000</i>	
8.	<i>Pelaksanaan Bulan Bakti gotong Royong Masyarakat (BBGRM)</i>	<i>Desa</i>	<i>Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)</i>	<i>100%</i>	<i>150.000.000</i>	<i>Pelaksanaan Bulan Bakti gotong Royong Masyarakat (BBGRM)</i>	<i>Desa</i>	<i>Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)</i>	<i>100%</i>	<i>150.000.000</i>	

9.	Rapat Koordinasi Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100%	50.000.000	Rapat Koordinasi Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan	68 Desa	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100%	50.000.000	
10.	Penyusunan Draf Rancangan Perda tentang Desa	Batu Lappa	Terlaksananya Penyusunan PERDA tentang Desa	-	0	Penyusunan Draf Rancangan Perda tentang Desa	Batu Lappa	Terlaksananya Penyusunan PERDA tentang Desa	-	0	
VI	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkat kapasitasnya	100%	500.000.000	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkat kapasitasnya	100%	500.000.000	
1.	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	11 Kecamatan	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	100%	75.000.000	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	11 Kecamatan	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	100%	75.000.000	

2.	Bimtek Pengisian Buku Administrasi Desa	11 Kecamatan	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam pengisian Buku Administrasi Desa	100%	45.000.000	Bimtek Pengisian Buku Administrasi Desa	11 Kecamatan	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam pengisian Buku Administrasi Desa	100%	45.000.000
3.	Pembinaan dan Evaluasi pengisian data Profil Desa/Kelurahan	11 Kecamatan	Tersedianya Data Profil Desa/Kelurahan	100%	95.000.000	Pembinaan dan Evaluasi pengisian data Profil Desa/Kelurahan	11 Kecamatan	Tersedianya Data Profil Desa/Kelurahan	100%	95.000.000
4.	Bimtek Penyusunan Perdes	11 Kecamatan	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Legislasi Desa (Bimtek penyusunan PERDES)	100%	55.000.000	Bimtek Penyusunan Perdes	11 Kecamatan	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Legislasi Desa	100%	55.000.000
5.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang desa	11 Kecamatan	Terselenggaranya Sosialisasi UU Desa/PP/Permendagri	-	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang desa	11 Kecamatan	Terselenggaranya Sosialisasi UU Desa/PP/Permendagri	-	0

6.	<i>Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa</i>	11 Kecamatan	<i>Terwujudnya peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa</i>	100%	65.000.000	<i>Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa</i>	11 Kecamatan	<i>Terwujudnya peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa</i>	100%	65.000.000
7.	<i>Bimtek APBDesa</i>	11 Kecamatan	<i>Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa dalam bidang APBDesa</i>	100%	65.000.000	<i>Bimtek APB Desa</i>	11 Kecamatan	<i>Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa dalam bidang APBDesa</i>	100%	65.000.000
8.	<i>Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang perencanaan partisipatif</i>	11 Kecamatan	<i>Terwujudnya peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Perencanaan Partisipatif</i>	100%	55.000.000	<i>Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang perencanaan partisipatif</i>	11 Kecamatan	<i>Terwujudnya peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Perencanaan Partisipatif</i>	100%	55.000.000

9.	<i>Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Inventarisasi Kekayaan dan Asset Desa</i>	11 Kecamatan	<i>Terwujudnya peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Inventarisasi Kekayaan Dan Asset Desa</i>	100%	45.000.000	<i>Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Inventarisasi Kekayaan dan Asset Desa</i>	11 Kecamatan	<i>Terwujudnya peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Inventarisasi Kekayaan Dan Asset Desa</i>	100%	45.000.000
10.	<i>Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Penataan Kawasan Perdesaan</i>	11 Kecamatan	<i>Terwujudnya peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Penataan Kawasan Perdesaan</i>	-	0	<i>Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Penataan Kawasan Perdesaan</i>	11 Kecamatan	<i>Terwujudnya peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Penataan Kawasan Perdesaan</i>	-	0
VII.	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Jumlah Bumdes dan Pasar Desa yang dibina	17%	80.000.000	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Jumlah Bumdes dan Pasar Desa yang dibina	17%	80.000.000
1.	<i>Pembinaan dan Fasilitasi Bumdes</i>	Desa	<i>Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitasi Bumdes (Pembentukam Bumdes)</i>	19%	35.000.000	<i>Pembinaan dan Fasilitasi Bumdes</i>	Desa	<i>Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitasi Bumdes (Pe,mbent ukan</i>	19&	35.000.000

								Bumdes)			
2.	<i>Pelatihan Bagi Pengelola Bumdes</i>	Desa	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes (Pelatihan Pengurus BUMDES)	100%	45.000.000	<i>Pelatihan Bagi Pengelola Bumdes</i>	68 Desa	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes (Pelatihan Pengurus BUMDES)	100%	45.000.000	
	TOTAL ANGGARAN				9.557.500.000	TOTAL ANGGARAN				14.188.500.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan usulan dari kegiatan Musrenbang yang terkait dengan usulan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sidenreng Rappang kedalam rancangan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dari hasil Forum SKPD dilakukan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPDP bagi setiap SKPD. Dalam keadaan terdapat usuln masyarakat yang mendesak dan belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPDP yang sudah dirancang. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan bersaran pagu indikatif setiap SKPD yang ditentukan dalam rancangan awal RKPDP. Setiap rancangan RKPDP ditentukan dalam rancanganc merupakan Integrasi dan harmonisasi antara rancangan awal RKPDP dengan rancangan Renja SKPD yang telah mendapatkan konfirmasi dan review dari setiap SKPD.

Musrenbang tahunan atau Musrenbang RKPDP dan Forum SKPD berfungsi menjembatangi kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang akan direncanakan. Adapun Usulan Program kegiatan daripada Pemangku Kepentingan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4 Usulan Program dan Kegiatan dari pada Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Kabupaten Sidenreng Rappang**

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<i>Batu Lappa</i>	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang efektif berfungsi		
1.	<i>Pembangunan Gedung Kantor</i>	<i>Pangkajene Sidenreng</i>	<i>Tersedianya Sarana & Prasarana Aparatur</i>	<i>Pembangunan/ Rehab Kantor Desa/BPD/Posyandu sebanyak 30 Paket (Hasil Musrenbang/Hasil Reses Anggota DPRD Thn 2016)</i>	<i>Perkiraan anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 3.260.000.000, -</i>

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan nasional harus bersifat terpadu, menyeluruh, sistematis dan tanggap terhadap perkembangan jaman yang terdiri dari RPJP Nasional 20 Tahunan, RPJM Nasional 5 Tahunan dan Renja Pemerintah Tahunan Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 dan RPJM Nasional Tahun 2014-2019 dengan memperhatikan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Sidenreng Rappang. RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Renstra SKPD dan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahunan.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan RKA dan APBD Tahun Anggaran 2017, sedangkan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju.

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Strategi pencapaian tujuan menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian hasil yang konsisten dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor yang sangat penting dalam proses perencanaan strategik. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya yang meliputi penetapan kebijakan dan program. Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak terkait dan ditetapkan menjadi pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran tertentu. Kemudian, kegiatan yang ingin dilaksanakan dalam tiap tahun akan dijelaskan dalam Formulir Rencana Kerja (*Yearly Performance Plan*).

a. Tujuan RENJA SKPD

Berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 dan Renstra SKPD Tahun 2014-2018, dimana tujuan dari pada Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Visi misi Bupati khususnya misi ke 6 (enam) yaitu mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job, dan pro lingkungan adalah meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat.

b. Sasaran RENJA SKPD

Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Dokumen RPJMD Tahun 2014 – 2018 dan Renstra BPMPD Tahun 2014 - 2018 adalah :

- Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat
- Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa

c. Indikator Sasaran SKPD

Indikator sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan RPJMD Tahun 2014 2018 adalah sebagai berikut :

- Persentase Desa yang berstatus Swakarsa
- Persentase Kelompok Masyarakat yang di Fasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya oleh LPM/LKMD
- Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang meningkat kapasitasnya

3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak di dalam menyusun Program/kegiatan senantiasa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

3.3.1 Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

NO.	PROGRAM	NO.	KEGIATAN	INDIKATOR
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat;</i>	<i>Tersedianya Kebutuhan surat menyurat;</i>
		2.	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;</i>	<i>Tersedianya jasa kebutuhan pemakaian listrik, telpon dan aair;</i>
		3.	<i>Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah;</i>	<i>Tersedianya jaminan barang milik Daerah;</i>
		4.	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;</i>	<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas;</i>
		5.	<i>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;</i>	<i>Tersedianya Administrasi Keuangan;</i>
		6.	<i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;</i>	<i>Tersedianya Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor;</i>
		7.	<i>Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi luar Daerah;</i>	<i>Tersedianya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;</i>
		8.	<i>Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi dalam Daerah.;</i>	<i>Tersedianya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah;</i>
		9.	<i>Pelayanan Administrasi Perkantoran.</i>	<i>Tersedianya Kebutuhan akan Pelayanan Adm. Perkantoran.</i>
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.	<i>Pembangunan Gedung Kantor ;</i>	<i>Tersedianya sarana dan prasarana aparatur;</i>
		2.	<i>Pengadaan Kendaraan</i>	<i>Tersedianya sarana</i>

			<i>Mobil Jabatan;</i>	<i>dan prasarana aparatur;</i>
		3.	<i>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;</i>	<i>Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor;</i>
		4.	<i>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;</i>	<i>Tersedianya Peralatan Gedung Kantor;</i>
		5.	<i>Pengadaan Mobiler;</i>	<i>Tersedianya Kebutuhan Mobiler;</i>
		6.	<i>Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor;</i>	<i>Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor;</i>
		7.	<i>Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional;</i>	<i>Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional;</i>
		8.	<i>Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;</i>	<i>Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;</i>
		9.	<i>Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor.</i>	<i>Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor.</i>
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	1.	<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Tersedianya LAKIP, RENSTRA & RKA/DPA</i>
4.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.	<i>Pembinaan dan Fasilitasi Pokja dan PKK Desa/Kelurahan;</i>	<i>Tersedianya Pembinaan dan Fasilitasi dan Pokja dan Kelompok PKK di Desa/Kelurahan;</i>
		2.	<i>Pendayagunaan dan Pemanfaatan TTG;</i>	<i>Terwujudnya Pendayagunaan dan Pemanfaatan TTG;</i>

		3.	<i>Pelaksanaan Gelar TTG;</i>	<i>Terselenggaranya Pelaksanaan Gelar TTG;</i>
		4.	<i>Pembinaan dan Fasilitasi Pos pelayanan TTG di Kecamatan;</i>	<i>Tersedianya Pos Pelayanan TTG di Kecamatan;</i>
		5.	<i>Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan Kader/Pokja AMPL;</i>	<i>Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan Kader/Pokja AMPL;</i>
		6.	<i>Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok UMKM;</i>	<i>Terwujudnya Pembinaan dan fasilitasi Kelompok UMKM;</i>
		7.	<i>Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (Pemetaan komunitas);</i>	<i>Tersedianya Data dan Informasi hasil Pemetaan Komunitas;</i>
		8.	<i>Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat (KPM D/K);</i>	<i>Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat (KPM D/K);</i>
		9.	<i>Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan Pokmas Pengelolaan air bersih;</i>	<i>Penguatan Kelembagaan Pokmas Pengelolaan Air Bersih (Asosiasi Spams);</i>
		10.	<i>Pelatihan Keterampilan bagi masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Alam menjadi barang produksi.</i>	<i>Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam mengelola Sumberdaya alam menjadi barang produksi.</i>
5.	<i>Peningkatan Partisipasi Dalam membangun</i>	1.	<i>Pembinaan kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Lomba Desa);</i>	<i>Terselenggaranya Pembinaan Desa/Kelurahan yang akan mengikuti Lomba Desa/Keluarahan</i>

	Desa			<i>tingkat Provinsi/Pusat (Lomba Desa);</i>
		2.	<i>Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;</i>	<i>Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;</i>
		3.	<i>Penyusunan PERDA tentang Desa</i>	<i>Terselenggaranya Penyusunan PERDA tentang Desa</i>
		4.	<i>Sosialisasi Pedoman Pengelolaan ADD;</i>	<i>Terselenggaranya Sosialisasi Pedoman Pengelolaan ADD bagi Aparatur Pemerintah Desa (Sosialisasi ADD);</i>
		5.	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD (Alokasi Dana Desa) dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DD (Dana Desa)</i>	<i>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD dan DD</i>
		6.	<i>PNPM;</i>	<i>Terlaksananya Pembinaan Proyek PNPM;</i>
		7.	<i>Pelatihan bagi pengurus LKMD/LPM;</i>	<i>Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LKMD/LPM);</i>
		8.	<i>Pelaksanaan Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM);</i>	<i>Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);</i>
		9.	<i>Rapat koordinasi Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan.</i>	<i>Terselenggaranya Rapat Koordinasi Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan.</i>
6.	Peningkatan Kapasitas	1.	<i>Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan</i>	<i>Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang</i>

	Aparatur Pemerintah Desa		<i>Keuangan Desa;</i>	<i>Pengelolaan Keuangan Desa (Pelatihan Keuangan Desa);</i>
		2.	<i>Bimtek Pengisian Buku Administrasi Desa;</i>	<i>Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengisian Buku Administrasi Desa;</i>
		3.	<i>Pembinaan dan Evaluasi Pengisian Data Profil Desa/Kelurahan;</i>	<i>Tersedianya Data Profil Desa/Kelurahan;</i>
		4.	<i>Bimtek Penyusunan Perdes;</i>	<i>Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang legilasi Desa (Bimtek Penyusunan PERDES);</i>
		5.	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa;</i>	<i>Terselenggaranya Sosialisasi UU Desa/PP/ Permendagri;</i>
		6.	<i>Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang manajemen Pemerintah Desa;</i>	<i>Terwujudnya Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintah Desa;</i>
		7.	<i>Bimtek APBDesa;</i>	<i>Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam bidang penyusunan APBDesa;</i>

		8.	<i>Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam bidang perencanaan partisipatif;</i>	<i>Terwujudnya Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam bidang perencanaan partisipatif;</i>
		9.	<i>Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Inventarisasi Kekayaan dan Asset Desa;</i>	<i>Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam bidang Inventarisasi kekayaan dan Asset Desa;</i>
		10.	<i>Pelatihan Aparatur pemerintah desa dalam bidang penataan kawasan perdesaan.</i>	<i>Terwujudnya Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam bidang pemetaan kawasan perdesaan.</i>
7.	<i>Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.</i>	1.	<i>Pembinaan dan Fasilitasi Bumdes;</i>	<i>Terwujudnya pembinaan dan fasilitas BUMDES (Pembentukan BUMDES);</i>
		2.	<i>Pelatihan bagi Pengelola Bumdes.</i>	<i>Terwujudnya peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDES (Pelatihan pengurus BUMDES).</i>
8	Keserasian Kebijakan Peningkakatan Kualitas Anak Dan Perempuan	1.	<i>Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran Dan Posisi Perempuan di Bidang Politik Dan Jabatan Politik</i>	<i>Terwujudnya Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran Dan Posisi Perempuan di Bidang Politik Dan Jabatan Politik</i>
		2.	<i>Peningkatan Kualitas hidup Perempuan di Bidang Ilmu</i>	<i>Tercapainya Peningkatan Kualitas hidup Perempuan di</i>

			<i>Pengetahuan & Teknologi</i>	<i>Bidang Ilmu Pengetahuan & Teknologi</i>
		3.	<i>Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak</i>	<i>Terselenggaranya Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak</i>
9	Poenguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender Dan Anak	1.	<i>Advokasi & Fasilitasi PUG Bagi Perempuan</i>	<i>Terselenggaranya Advokasi & Fasilitasi PUG Bagi Perempuan</i>
		2.	<i>Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)</i>	<i>Terselenggaranya Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)</i>
		3.	<i>Penguatan Kelembagaan PUG & Anak</i>	<i>Terciptanya Penguatan Kelembagaan PUG & Anak</i>
		4.	<i>Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan</i>	<i>Tersedianya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan</i>
		5.	<i>Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender</i>	<i>Tersedianya Data Gender Dan Anak</i>
		6.	<i>Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan & Anak</i>	<i>Terselenggaranya Pembinaan Dan Penilaian GSI Tk Kab. Sidrap</i>
		7.	<i>Evaluasi Pelaksanaan PUG</i>	<i>Terselenggaranya Monev Pengerusutamaan Gender</i>
		8.	<i>Pelaksanaan Kebijakan</i>	<i>Terselenggaranya Kebijakan</i>

			<i>Perlindungan Perempuan Di Daerah</i>	<i>Perlindungan Perempuan Di Daerah</i>
		9.	<i>Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan</i>	<i>Tersedianya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan</i>
		10.	<i>Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan</i>	<i>Terselenggaranya Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan</i>
		11.	<i>Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak</i>	<i>Terselenggaranya Pembinaan & Pelatihan Bagi Perempuan Dibidang Politik</i>
		12.	<i>Tercapainya Kab. Layak Anak</i>	<i>Tercapainya Kab. Layak Anak</i>
		13.	<i>Pengadaan Taman Bermain Anak</i>	<i>Terwujudnya Taman Bermain Anak</i>
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	1.	<i>Kegiatan Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam Mengelola Usaha</i>	<i>Terselenggaranya Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha</i>

Terkait dengan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 tersebut diatas, maka didalam penyusunannya senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi Bupati/wakil Bupati terpilih sebagaimana yang tertuang didalam RPJMD periode 2014 s/d 2018, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis SKPD. Sedangkan rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut :

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada organisasi. Di sisi lain, Rencana Kerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang akan menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan Implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan. Di samping itu perlu penyusunan perencanaan Renja akhir yang lebih komprehensif, efektif dan berbasis pada kepentingan masyarakat.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah dan memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja sasaran dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita, citra dan harapan pemerintah dan masyarakat.

Pangkajene Sidenreng, Mei 2017
Kepala Dinas

PATAHANGI NURDIN, S. IP

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19691220 199009 1 002

Tabel I. A

**EVALUASI HASIL RENJA DPMDDPPA TAHUN 2018
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016 (2014-2016)	Target Kinerja Renja Tahun 2017	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2017				
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)			
1												
1	22											
1	22	01										
1	22	0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat	11.250.000	3.879.000	2.250.000	900.000	40%	4.779.000	42%
1	22	0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Kebutuhan Pemakaian Listri, Telpon & Air	283.310.000	94.854.000	70.000.000	10.236.133	15%	105.090.133	37%
1	22	01	05	Penyediaan Jasa Milik Daerah	Tersedianya Jaminan Barang Milik Daerah	25.080.000	14.040.000	5.016.000	0	0%	14.040.000	56%
1	22	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Jasa Kebutuhan Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	10.000.000	4.169.000	2.000.000	0	0%	4.169.000	42%
1	22	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Administrasi Keuangan	453.060.000	252.620.000	100.000.000	30.309.750	30%	282.929.750	62%
1	22	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor	65.980.000	43.193.000	13.196.000	5.495.000	42%	48.688.000	74%
1	22	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Tersedianya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	751.124.000	546.693.000	150.000.000	70.285.983	47%	616.978.983	82%
1	22	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	44.000.000	4.493.000	10.000.000	430.000	4%	4.923.000	11%

1	22	01	20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	1.120.383.000	438.335.000	247.538.000	46.745.000	19%	485.080.000	43%
1	22	02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasaran aparatur yang efektif Berfungsi							
1	22	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	13.270.075.000	2.804.288.000	3.260.000.000	0	0%	2.804.288.000	21%
1	22	02	04	Pengadaan Kendaraan Mobil jabatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	0	0	#DIV/0!	-	#DIV/0!
1	22	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	182.800.000	45.990.000	34.000.000	0	0%	45.990.000	25%
1	22	22	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	182.800.000	31.080.000	34.000.000	0	0%	31.080.000	17%
1	22	02	10	Pengadaan Mubeler	Tersedianya Kebutuhan Mubeler	0	0	45.000.000	0	0%	-	#DIV/0!
1	22	02	22	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung kantor	225.171.000	39.986.000	50.000.000	0	0%	39.986.000	18%
1	22	02	24	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	209.512.000	73.298.000	45.000.000	0	0%	73.298.000	35%
1	22	02	26	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	25.400.000	3.450.000	6.000.000	0	0%	3.450.000	14%
1	22	02	28	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung kantor	30.800.000	8.150.000	6.000.000	0	0%	8.150.000	26%
1	22	06		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Capaian Kinerja & Keuangan						-	
1	22	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja DPMDDPA	Tersedianya Lakip, Renstra, & RKA/ DPA	92.500.000	55.018.000	18.500.000	12.360.000	67%	67.378.000	73%
1	22	15		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Desa yang berstatus swakarsa							
1	22	01	15	Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	699.680.000	386.557.000	0	0	#DIV/0!	386.557.000	55%

1	22	15	01	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Dan Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Dan Masyarakat	610.000.000	0	150.000.000	0	0%	0	0%
1	22	15		Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1	22	15		Pembinaan & Fasilitas Pos Pelayanan TTTG di Kecamatan	Tersedianya Pos Pelayanan TTTG di Kecamatan	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1	22	15	05	Pembinaan & Fasilitas Pokja & PKK Desa & Kelurahan	Pembinaan & Fasilitas Pokja & PKK Desa & Kelurahan	2.300.000.000	919.101.000	500.000.000	9.950.628	2%	929.051.628	40%
1	22	15		Pembinaan & Fasilitas Kelembagaan POKMAS Pengelolaan Air Bersih	Pembinaan & Fasilitas Kelembagaan POKMAS Pengelolaan Air Bersih	0	0	30.000.000	0	0%	0	#DIV/0!
1	22	15		Pembinaan Dan Fasilitas Kelembagaan Kader/ Pokja AMPL	Pembinaan Dan Fasilitas Kelembagaan Kader/ Pokja AMPL	0	0	60.000.000	0	0%	0	#DIV/0!
1	22	15		Pembinaan & Fasilitas Kelompok UMKM	Terwujudnya Pembinaan & Fasilitas Kelompok UMKM	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1	22	15	04	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (Pemetaan Komunikasi)	Tersedianya data & informasi hasil pemetaan komunikasi	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1	22	15	02	Pendidikan & Pelatihan Tenaga Teknis & Masyarakat (KPMD/K)	Terselenggaranya Pendidikan & Pelatihan Tenaga Teknis & Masyarakat (KPMD/K)	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1	22	15		Pelatihan Keterampilan Bagi Masyarakat dalam Mengelola Sumber Daya Alam menjadi Barang Produksi	Pelatihan Keterampilan Bagi Masyarakat dalam Mengelola Sumber Daya Alam menjadi Barang Produksi	1.880.000.000	0	500.000.000	319.036.400	64%	319.036.400	17%
1	22	15		Pendayagunaan Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pendayagunaan Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	200.000.000	45.094.000	50.000.000	0	0%	45.094.000	23%
1	22	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa							
1	22	17		Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!

1	22	17	01	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Lomba Desa)	Desa/ kelurahan yang dibina dan akan mengikuti lomba desa/ kelurahan tingkat provinsi/ pusat	0	0	180.000.000	244880000	136%	244.880.000	#DIV/0!
1	22	17		Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa & Kelurahan	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa & Kelurahan	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1	22	17		Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Terlaksananya Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	1.000.000.000	0	0	0	#DIV/0!	0	0%
1	22	17	04	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	341.000.000	337.318.000	73.000.000	0	0%	337.318.000	99%
2	22	17	05	PNPM	Terlaksananya Pembinaan Proyek PNPMP	370.000.000	655.250.000	370.000.000	6.075.000	2%	661.325.000	179%
1	22	17		Pelatihan Bagi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LKMD/LPM)	Terwujudnya Pelatihan Bagi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1	22	17		Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1	22	17		Rapat Koordinasi Kelembagaan Masyarakat Desa Kelurahan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Kelembagaan Masyarakat Desa Kelurahan	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1	22	17	06	Sosialisasi Pedoman Pengelolaan ADD	Terselenggaranya Sosialisasi Pedoman Pengelolaan ADD	303.000.000	166.624.000	61.000.000	54.998.750	90%	221.622.750	73%
1	22	17		Penyusunan Draf Rancangan Perda tentang Desa	Terlaksananya Penyusunan Perda tentang Desa	70.000.000	101.907.000	0	0	#DIV/0!	101.907.000	146%
1	22	17	08	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (Pemilihan & Pelantikan Kepala Desa)	Tersedianya Kepala Desa Definitif	700.000.000	256.512.000	350.000.000	0	0%	256.512.000	37%
1	22			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan							
1	22	17		Pelatihan & Fasilitasi Bumdes	Terlaksananya Pelatihan & Fasilitasi Bumdes	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!

1	22	17		Pelatihan Bagi Pengelola Bumdes	Terlaksananya Pelatihan Bagi Pengelola Bumdes	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1	22			Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	0	96.215.000	0	0	#DIV/0!	96.215.000	#DIV/0!
1	22			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa							
1	22			Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	301.345.000	127.695.000	75.000.000	0	0%	127.695.000	42%
1	22	18		Bimtek Pengisian Buku Administrasi Desa	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengisian Buku Administrasi Desa	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1	22	18	06	Pembinaan & Evaluasi Pengisian data Profil Desa/ Kelurahan	Tersedianya Data Profil Desa/ Kelurahan	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1	22	18	07	Bimtek Penyusunan Perdes	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Legislasi Desa	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1	22			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Desa	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Desa	95.000.000	78.930.000	0	0	#DIV/0!	78.930.000	83%
1	22			Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	0	156.172.000	65.000.000	0	0%	156.172.000	#DIV/0!
1	22	18		Bimtek APBDesa	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Penyusunan APBDesa	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1	22	18		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Partisipasi	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Partisipasi	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1	22			Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Investasi Kekayaan & Aset desa	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Investasi Kekayaan & Aset desa	0	60.390.000	0	0	#DIV/0!	60.390.000	#DIV/0!

1	22	18	Pelantikan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Penataan Kawasan Pedesaan	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Penataan Kawasan Pedesaan	0	0	0	0	#DIV/0!	-	#DIV/0!
1	22		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Mewujudkan Pencapaian Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Penegakkan Supremasi Hukum & Pengembangan Kebijakan yang Pro Gender, Pro Poor, Pro Job & Pro Environment							
1	22		Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran Dan Posisi Perempuan Dibidang Politik Dan Jabatan Politik	Terwujudnya Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran Dan Posisi Perempuan Dibidang Politik Dan Jabatan Politik	250.000.000	0	0	0	#DIV/0!	-	0%
1	22		Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan diBidang Ilmu Pengetahuan & Teknologi	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan diBidang Ilmu Pengetahuan & Teknologi	150.000.000	0	0	0	#DIV/0!	-	0%
1	22		Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Terwujudnya Terselenggaranya Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	50.000.000	0	0	0	#DIV/0!	-	0%
1	22	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak	Mewujudkan Pencapaian Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Penegakkan Supremasi Hukum & Pengembangan Kebijakan yang Pro Gender, Pro Poor, Pro Job & Pro Environment							
1	22	16	Advokasi & Fasilitasi PUG Bagi Perempuan	Terwujudnya Terselenggaranya Advokasi & Fasilitasi PUG Bagi Perempuan	50.000.000	-	-	-	#DIV/0!	-	0%

1	22	16	02	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	185.750.000	230.239.000	55.000.000	12.027.868	22%	242.266.868	130%
1	22	16		Penguatan Kelembagaan PUG & Anak	Terciptanya Penguatan Kelembagaan PUG & Anak	50.000.000	0	0	0	#DIV/0!	0	0%
1	22	16		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Tersedianya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	50.000.000	0	0	0	#DIV/0!	0	0%
1	22	16		Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender	Tersedianya Data Gender Dan Anak	50.000.000	0	0	0	#DIV/0!	0	0%
1	22	16	06	Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan & Anak	Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan & Anak	200.000.000	37.891.000	70.000.000	0	0%	37.891.000	19%
1	22	16	07	Evaluasi Pelaksanaan PUG	Evaluasi Pelaksanaan PUG	114.250.000	49.176.000	22.000.000	0	0%	49.176.000	43%
1	22	16		Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Di Daerah	Terselenggaranya Kebijakan Perlindungan Perempuan Di Daerah	150.000.000	0	0	0	#DIV/0!	-	0%
1	22	16		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Tersedianya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	50.000.000	0	0	0	#DIV/0!	-	0%
1	22	16		Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Terselenggaranya Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	50.000.000	0	0	0	#DIV/0!	-	0%
1	2	18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan							
1	22	18		Kegiatan Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam Mengelola Usaha	Kegiatan Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam Mengelola Usaha	288.250.000	-	1.300.000	0	0%	0	0%